

**KLAUSUL EKSONERASI PADA PERJANJIAN KREDIT UKM USAHA  
MIKRO DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DEBITUR SEBAGAI  
KONSUMEN**

**TESIS**



**Oleh :**

**Ardi Ristaranto**

**166010202111043**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2018**

Lembar Pengesahan

Judul :

**KLAUSUL EKSONERASI PADA PERJANJIAN KREDIT UKM USAHA  
MIKRO DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DEBITUR SEBAGAI  
KONSUMEN**

Oleh :

**Ardi Ristaranto**

**166010202111043**

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H. M.H.  
NIP. 1954092 5198003 1 002

Dr. Prija Djatmika, S.H. M.S.  
NIP. 1961111 6198601 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr.Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum

NIP.19571021 198601 1 002

## **RINGKASAN**

Ardi Ristaranto, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, **KLAUSUL EKSONERASI PADA PERJANJIAN KREDIT UKM USAHA MIKRO DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DEBITUR SEBAGAI KONSUMEN**, Pembimbing Utama : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Pembimbing Kedua : Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.,

Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas tentang persoalan Klausul Eksonerasi Pada Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro Dalam Rangka Perlindungan Debitur Sebagai Konsumen. Yang mana mengambil dua rumusan permasalahan, permasalahan pertama Apakah akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro? Sedangkan permasalahan kedua adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi debitur dalam perjanjian kredit UKM usaha mikro terkait klausul eksonerasi di dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode analisis datanya adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro adalah perjanjian kredit tersebut batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasa 11321 KUHPerdato Jo. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku tertanggal 20 Agustus 2014. Bentuk Perlindungan Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro Terkait Klausul Eksonerasi Di Dalam Perjanjian Tersebut adalah:

- a. Lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan KUR UKM Usaha Mikro melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tugasnya melakukan pengawasan sebagai langkah perlindungan preventif.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Pemberian subsidi bunga dengan besaran subsidi bunga untuk Kredit UKM Usaha Mikro sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Pemberlakuan tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Perlindungan Hukum, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi

## SUMMARY

Ardi Ristaranto, Student of Master of Notaries Study Program, Faculty of Law Brawijaya University, Malang, July 2018, **EXONERATION CLAUSE FOR MICRO BUSSINESS SME`S CREDIT AGREEMENT AS CONSUMER`S DEBITORS PROTETION**, Prime Advisor : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Second Advisor : Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.,

---

In this journal, the author want to discuss a problem about **Exoneration Clause for Micro Bussiness SMEs Credit Agreement as Consumer's Debtors Protection**. The author deducetwo formulation of problems to discuss. The first one, What are the legal consequences of a credit agreement that includes an exoneration clause in the SME Micro Enterprise Credit Agreement? Next to the second problem, What kind of protection for the debtor in the microcredit loan agreement of the micro-enterprise related to the exoneration clause in the agreement? This study classified as empirical research using Descriptive Qualitative Data Analytic Method.

From the study result, the Consequences of Law of Credit Agreement that include Exoneration Clause on Micro Bussiness SMEs Credit Agreement, the deal can be null and void, as it's against Pasal 1321 KUHPerdata Jo. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku tertanggal 20 Agustus 2014. The Protection Form for Debtor In Micro Bussiness SMEs Credit Agreement related tp Exoneration Clause on the agreement are:

- a. The birth of Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 about Financial Services Sector Consumer Protection
- b. Supervision conducted by the government related to the implementation of Micro Small Medium Business Credit through the Policy Committee of Financing for Micro, Small and Medium Enterprises, whose duties are to conduct supervision as preventive protection measure.
- c. Supervision conducted by the Coordinating Forum for Supervision of "People's Business Credit" which consists of the Finance and Development Supervisory Board (Coordinator), Coordinating Ministry of Economic Affairs, Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Industry, The Ministry of Manpower, the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, and the Financial Services Authority.
- d. The subsidy of interest by the amount of interest subsidy for Micro Business Credit of 10% (ten percent).
- e. Additional credit / financing (supplementing) and restructuring

**Keywords:** Consequences of Law, Legal Protection, Standard Agreement, Exoneration Clause

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya tesis ini. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan doa, semangat, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Imam Kuswahyono, S.H. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelajaran yang berharga dan membantu dalam administrasi penyelesaian tesis ini bagi penulis.
6. Kedua orangtua tercinta ayahanda Edi HarisPitarto dan ibunda Dra. Samiyaniyang selalu memberikan dukungan moral dan material, doa serta curahan kasih sayang yang tidak akan pernah bisa penulis balas dengan apapun.
7. Kakak Anggrahini Ristaranti A.Md beserta keluarga yang sudah membantu selama ini.
8. Charlie Lady Beauty Afriesta, S.T. yang sudah sangat sabar membantu saya menjadi

lebih baik, dan selalu mengingatkan untuk terus berbuat kebaikan.

9. Ibu dosen Universitas Halu Oleo, Deschika Gaby Justicia, S.H., M.Kn., yang selalu membantu dalam memberikan masukan demi keberlangsungan tesis ini.
10. Keluarga Besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Malang, Juli 2018

Penulis

ARDI RISTARANTO

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN OROSINALITAS TESIS .....	ii
RINGKASAN .....	iii
SUMMARY .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	7
1.6 Kerangka Teoritik .....	11
1.6.1 Teori Perlindungan Hukum .....	11
1.6.2 Teori Keadilan .....	12
1.6.3 Tinjauan Pustaka Perjanjian Baku .....	15
1.7 Metode Penelitian .....	16

1.7.1 Jenis Penelitian.....	16
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	17
1.7.3 Jenis dan Sumber .....	18
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	20
1.8 Sistem Penulisan .....	22

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Hukum Perjanjian .....	24
2.1.1 Pengertian Hukum Perjanjian .....	24
2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian .....	25
2.1.3 Subjek Perjanjian .....	26
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian .....	27
2.1.5 Asas-asas Perjanjian.....	31
2.1.6 Perjanjian Kredit .....	34
2.2 Kajian Pustaka Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	36
2.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	36
2.2.2 Beberapa Hal Terkait Perlindungan Konsumen .....	37
2.2.2.1 Produsen Atau Pelaku Usaha .....	37
2.2.2.2 Konsumen .....	38
2.2.2.3 Produk Dan Standarisasi .....	39
2.2.2.4 Peranan Pemerintah .....	41



2.2.2.5 Klausula Baku .....	42
2.2.3 Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	44
2.3 Kajian Umum Tentang Perbankan.....	46
2.3.1 Pengertian Bank Dan Hukum Perbankan .....	46
2.3.2 Asas-asas Hukum Perbankan.....	47
2.3.2.1 Asas Demokrasi Ekonomi.....	47
2.3.2.2 Asas Kepercayaan.....	48
2.3.2.3 Asas Kerahasiaan.....	48
2.3.2.4 Asas Kehati-hatian .....	48
2.3.3 Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah .....	49
2.4 Kajian Pustaka Tentang <i>Good Corporate Governance</i> .....	52
2.4.1 Prinsip-prinsip.....	52
2.4.1.1 Keadilan .....	54
2.4.1.2 Transparansi.....	54
2.4.1.3 Akuntabilitas .....	54
2.4.1.4 Responsibilitas .....	55
 <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausul Eksonerasi Pada Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro.....	56
3.2 Bentuk Perlindungan Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro Terkait Klausul Eksonerasi Di Dalam Perjanjian Tersebut .....	80

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan .....	90
4.2Saran .....	91
DAFTAR PUTAKA .....	92

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Persoalan finansial menjadi persoalan yang kerap terjadi pada kebanyakan orang di Indonesia dan seperti tidak ada habisnya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya lembaga-lembaga keuangan selain untuk menjawab kebutuhan individu terkait dengan bagaimana mereka bisa menyimpan hartanya maupun bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun patut dicatat seberapa besar pendapatan seseorang pasti lah selalu merasa kurang. Fenomena seperti ini mengakibatkan bermunculannya kredit-kredit konsumtif beserta fasilitas pendukungnya. Fasilitas-fasilitas pendukung itu mulai dari rendahnya bunga maupun berbagai hadiah yang ditawarkan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya.

“Sehingga untuk menjamin kepastian tentang kredit yang dikururkan oleh bank kepada nasabahnya, maka dibuatlah suatu perjanjian kredit. Sebuah perjanjian kredit menurut Subekti dan Tjitrosudibio<sup>1</sup> tentu saja tidak lepas dari aturan yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat perjanjian, yang antara lain sebagai berikut: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkandirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk

---

<sup>1</sup>Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita: 2003), hlm. 330

membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.”

Fakta di masyarakat terkesan bahwa dalam hubungan antara bank dan nasabah/debitur, bank selalu berada di posisi yang lebih kuat. Hal tersebut karena pada saat perjanjian, calon nasabah/debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari bank, sehingga pada umumnya calon nasabah/debitur tidak banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar-menawar bank menjadi sangat kuat. Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung pada integritas nasabah/debitur. Bila nasabah/ debitur menyalah gunakan kredit atau tidak bersedia membayar kembali kredit yang telah macet maka bank memang perlu mencari penyelesaian melalui bantuan hukum.

Dengan adanya UUPK, bank diberikan larangan untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian kredit Bank, maka perjanjian ini adalah DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALAN oleh Debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan. Hal ini bisa di-ilustrasikan seperti pada fakta, betapa berat-nya suku bunga yang harus ditanggung oleh Debitur, seperti pada periode tahun 1999 yaitu awal krisis moneter terjadi di Indonesia, dimana Bank secara sah telah menaikkan suku

bunga pinjaman hingga mencapai 27% (dua puluh tujuh persen) per tahun, dari suku bunga pinjaman sebelumnya yang hanya sebesar 10% s.d. 12%. Per tahun, yang akibatnya banyak debitur-debitur bank yang tidak sanggup melunasi kewajiban hutang pokok berikut bunga yang telah dinaikkan sepihak oleh Bank.

Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 poin G. "menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;"

#### PENJELASAN PASAL :

Atau dengan kata lain UUPK telah melarang Bank untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit.

Di dalam dunia perbankan perjanjian antara nasabah dan pihak perbankan menjadi demikian penting. Terkadang banyak menimbulkan masalah di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Tak jarang seorang nasabah bank merasa dirugikan dengan perjanjian kredit yang mereka lakukan dengan pihak bank dan ada kecenderungan ketidakmampuan konsumen memahami perjanjian yang sudah dibuat. Disamping itu keinginan yang ingin mempercepat turunnya kredit yang merekaajukan karena mereka didesak oleh kebutuhan finansial. Mereka tidak peduli dengan isi perjanjian kredit yang mengikat antara mereka dengan pihak perbankan. Bisa dicontohkan di dalam perjanjian kredit sering kali bank tidak memberikan kepastian dan pemberitahuan terkait dengan perubahan besarnya bunga bank, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap cicilan kredit yang

dibayarkan oleh nasabah, hal inilah yang kemudian memberatkan pihak konsumen sehingga terjadi kredit macet. Besaran bunga yang dapat diubah sewaktu-waktu menjadi salah satu klausul di dalam perjanjian kredit perbankan yang nyata-nyata memang sebagai *standart contract*. Tidak hanya itu besarnya denda akibat keterlambatan pembayaran cicilan yang tidak ditentukan secara pasti oleh Perbankan kepada nasabah sebagai debitur membuat nasabah semakin tidak berkulit. Besaran denda pun menjadi salah satu klausul dari *standart contract* yang dibuat antara nasabah sebagai debitur dengan pihak perbankan. Ketidak cermatan dan sikap terburu-buru konsumen dalam membaca kontrak dan segera mendapatkan kredit yang diinginkan inilah yang menyebabkan terkesan pihak bank sebagai kreditur tidak adil. Tetapi nasabah juga dihadapkan dalam sebuah pilihan, yaitu apabila mereka tidak mau menerima dua klausul diatas yaitu bunga dan denda yang dapat berubah sewaktu-waktu mereka tidak akan mendapatkan kredit yang diajukan dan tentu saja pihak bank akan memberikan pilihan agar nasabah mencari lembaga keuangan lainnya.

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausula yang memberatkan nasabah/debitur. Pihak nasabah/debitur akan dibebani dengan sejumlah kewajiban yang merupakan hak-hak bank yang mesti dipenuhinya. Kelemahan kedudukan nasabah/debitur itulah yang oleh pihak bank dimanfaatkan dengan lebih banyak membuat perjanjian dalam bentuk baku yang di dalamnya dimuat klausula eksonerasi (*exoneratie klausule, exemption klausule*) yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Hal ini terdapat pada semua perjanjian kredit, baik

itu perjanjian kredit perorangan, perjanjian kredit kepemilikan rumah maupun perjanjian kredit Mikro UKM. Pada penulisan tesis ini penulis akan membahas terkait dengan Perjanjian Kredit Mikro UKM, nasabah sebagai debitur dalam hal ini UKM dalam membuat perjanjian kredit dengan pihak debitur dalam hal ini perbankan juga telah dilindungi oleh “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, sehingga seharusnya nasabah mendapatkan perlindungan yang maksimal terkait klausul eksonerasi yang sering kali muncul dalam perjanjian kredit antara nasabah dan perbankan. Meskipun nasabah dalam hal ini UKM tidak mungkin diberikan kesempatan untuk merundingkan isi klausula baku, UKM sebagai konsumen yang juga bertindak sebagai debitur masih memiliki hak atau kebebasan untuk menerima atau menolak klausula baku itu, hal ini sesuai dengan asas kontrak perjanjian baku bagi konsumen, yakni asas *freedom of entrance*. Karena pembatasan tanggung jawab tersebut berupa pembuatan adanya klausula dalam setiap transaksi yang dilakukan. Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang dinamakan perjanjian baku. Contoh klausul eksonerasi apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga maka debitur harus tunduk pada peraturan yang berlaku atau membebaskan bunga tersebut ke debitur. Debitur harus tunduk pada peraturan bank yang dibuat dan membebaskan bank dengan segala tuntutan jika dilihat maknanya maka dapat disimpulkan disini yang kuat menekan yang lemah. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengangkat Judul: **“Klausul Eksonerasi Pada Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro Dalam Rangka Perlindungan Debitur Sebagai Konsumen”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi debitur dalam perjanjian kredit UKM usaha mikro terkait klausul eksonerasi di dalam perjanjian tersebut?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro tersebut.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi debitur dalam perjanjian kredit UKM usaha mikro terkait klausul eksonerasi di dalam perjanjian tersebut.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Secara teori:

- a. Dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai klausul eksonerasi dan penyelesaian sengketa bagi pihak nasabah dengan perbankan.



Secara praktis dapat memberi masukan kepada:

- a. Bagi penulis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum khususnya ilmu hukum bisnis dan kenotariatan, mengenai bentuk perlindungan bagi UKM dalam perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro dalam terkait klausul eksonerasi di dalam perjanjian tersebut dan upaya yang dapat dilakukan oleh UKM apabila terjadi sengketa terkait penerapan klausul eksonerasi pada perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro.
- b. Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat penerapan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro.
- c. Pemerintah: Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif khususnya kepada Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan serta Pihak Perbankan terkait dengan penerapan asas eksonerasi dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat penerapan klausul .eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro.

## **1.5 ORISINALITAS PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang di kaji dan diangkat belum pernah ada penelitian yang terdahulu yang mengkaji dan mengangkat tentang tingkat pemahaman nasabah terhadap penerapan Klausul Eksonerasi Pada Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro Dalam Rangka Perlindungan Debitur Sebagai Konsumen. Berdasarkan penelusuran kepustakaan hingga saat ini tingkat keaslian dari

penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun demikian akibat keterbatasan dalam melacak hasil penelitian maka tidak menutup kemungkinan pokok persoalan yang diteliti memiliki kemiripan dengan peneliti lainnya karena lingkup penelitian yang sama yaitu lingkup dunia Perjanjian, tetapi penulis mempunyai keyakinan bahwa penulisan penelitian ini mempunyai sudut pandang yang berbeda. Berkaitan dengan keaslian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian yang terdahulu, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Penulis/Peneliti	Judul Tesis	Permasalahan Yang Dikaji	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Andreanto Mahardhika. S (Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang )	Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali.	1. Apakah perjanjian jual beli perumahan dalam bentuk kontrakbaku berklausula eksonerasi... sah ditinjau dari hukum perjanjian ? 2. Apakah klausula	2010	1. Ditinjau dari kebebasan membuat perjanjian ( <i>freedom of contract</i> ) perjanjian baku berklausula eksonerasi tidak memenuhi syarat

			eksonerasi yang terdapat dalam kontrak baku jual beliperumahan melanggar ketentuan klausula baku sebagaimana di atur dalam Undang-undang perlindungan konsumen?		<p>subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.</p> <p>2. Klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pengembang dalam</p>
--	--	--	---	--	---

					<p>perjanjian</p> <p>jual beli</p> <p>rumah yang</p> <p>berisi</p> <p>ketentuan</p> <p>pengalihan</p> <p>tanggung</p> <p>jawab,</p> <p>tindakan</p> <p>berupa</p> <p>pembatalan</p> <p>sepihak dan</p> <p>pengembang</p> <p>tidak</p> <p>mengembali</p> <p>kan uang</p> <p>yang</p> <p>dibayarkan</p> <p>oleh pembeli</p> <p>adalah</p> <p>melanggar</p> <p>Pasal 18</p> <p>ayat (1)</p> <p>huruf a, c,</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>dan d</p> <p>Undang-</p> <p>undang</p> <p>perlindunga</p> <p>n konsumen.</p> <p>Selanjutnya</p> <p>menurut</p> <p>Pasal 18</p> <p>ayat (3)</p> <p>Undang-</p> <p>undang</p> <p>Perlindunga</p> <p>n Konsumen</p> <p>setiap</p> <p>klausula</p> <p>baku yang</p> <p>ditetapkan</p> <p>oleh pelaku</p> <p>usaha pada</p> <p>dokumen</p> <p>atau</p> <p>perjanjian</p> <p>yang</p> <p>memenuhi</p>
--	--	--	--	--	--

					ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Perlindunga n Konsumen dinyatakan batal demi hukum.
2.	I Made Mustapa, SH. (Program PascasarjanaUniversitas Diponegoro, Semarang)	Perjanjian Jual Beli Perumahan Yang Memuat Klausula Eksonerasi di Kabupaten Bekasi.	1. Apakah kontrak baku jual-beli perumahan yang terdapat dalam klausula eksonerasi melanggar ketentuan klausula baku	2008	1. Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian jual-beli perumahan di Kabupaten Bekasi dalam perspektif kebebasan

			<p>sebagaimana</p> <p>di atur dalam</p> <p>Undang-</p> <p>undang</p> <p>Perlindungan</p> <p>Konsumen.</p> <p>2. Bagaimana</p> <p>penyelesaian</p> <p>nya jika</p> <p>terjadi</p> <p>wanprestasi</p> <p>kontrak baku</p> <p>dalam jual</p> <p>beli</p> <p>perumahan</p> <p>yang terdapat</p> <p>dalam</p> <p>klausula</p> <p>eksonerasi ?</p>		<p>membuat</p> <p>perjanjian</p> <p>(<i>freedom of</i></p> <p><i>contract</i>)</p> <p>tidak</p> <p>memenuhi</p> <p>syarat</p> <p>subyektif dan</p> <p>syarat</p> <p>obyektif</p> <p>sebagaimana</p> <p>ditentukan</p> <p>dalam Pasal</p> <p>1320</p> <p>KUHPperdata.</p> <p>Dengan</p> <p>demikian</p> <p>secara</p> <p>yuridis</p> <p>materiil</p> <p>perjanjian</p> <p>baku tersebut</p> <p>tidak</p> <p>mempunyai</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>kekuatan mengikat.</p> <p>2. Klausula eksonerasi dicantumkan pengembang dalam perjanjian jual-beli rumah yang berisi ketentuan pengalihan tanggung jawab, tindakan berupa pembatalan sepihak dan pengembang tidak mengembalikan uang yang</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>dibayarkan oleh pembeli adalah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a, c dan d Undang- undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya menurut Pasal 18 ayat (3) Undang- undang Perlindungan Konsumen setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>dokumen</p> <p>atau</p> <p>perjanjian</p> <p>yang</p> <p>memenuhi</p> <p>ketentuan</p> <p>sebagaimana</p> <p>dimaksud</p> <p>pada ayat (1)</p> <p>dan ayat (2)</p> <p>Undang-</p> <p>undang</p> <p>Perlindungan</p> <p>Konsumen</p> <p>dinyatakan</p> <p>batal demi</p> <p>hukum.</p> <p>3. Penyelesaian</p> <p>sengketa</p> <p>melalui</p> <p>Putusan</p> <p>Pengadilan.</p>
--	--	--	--	--	--

## 1.6 KERANGKA TEORITIK

### 1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda berbunyi *rechtbercherming van de bergers tegen de overlead*<sup>2</sup>. Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo menyatakan awal mula munculnya teori perlindungan hukum tersebut bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>3</sup>

Menurut Hadjon pada dasarnya ada 2 macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Perlindungan Hukum Preventif : Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>2</sup> Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm 1.

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2000), hlm.53.

<sup>4</sup> Hadjon, Philipus M. *op. cit*, hlm 3.

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif : Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, seperti disebutkan Paulus E. Loutulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>5</sup>

### 1.6.2 Teori Keadilan

Ada dua citra hukum yang tidak boleh diabaikan dalam melakukan penegakan hukum, yaitu keadilan dan ketertiban. Akhir-akhir ini keadilan menjadi sesuatu yang sering diperbincangkan di masyarakat, keadilan dianggap sebagai Panglima dalam penegakan hukum sering diabaikan, sehingga terkesan hukum menjadi tajam di bawah dan tumpul di atas. Hukum dianggap hanyalah milik penguasa dan golongan tertentu yang memang mampu “membeli” hukum. Ironisnya kebenaran hukum dan keadilan selama ini mampu dimanipulasi dengan sistemik sehingga peradilan tidak dapat menemukan keadaan yang sebenarnya dan berjalan secara adil.

---

<sup>5</sup> Paulus E. Loutulung, 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. CitraAditya Bakti, Bandung. Hlm 123.

Munir Fuady<sup>6</sup> berpendapat kata *Justice* memiliki kesamaan dengan kata *Equity* yaitu keadilan. Yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*);
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*);
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Bahder Johan Nasution melihat keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.<sup>8</sup> Keadilan juga merupakan bagian dari yang tidak terpisah dari tujuan hukum itu sendiri bersanding dengan kepastian dan kemanfaatan.

Menurut Inge Dwisvimiar para ahli baik Stamler maupun Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum.<sup>9</sup> Demikian pula Radbruch yang menilai keadilan sebagai tujuan hukum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan hukum.<sup>10</sup> Fungsi hukum itu sendiri menurut Inge Dwisvimiar adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.<sup>11</sup> Inge Dwisvimiar menambahkan ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian suatu konsep dasar, yaitu manusia harus

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 91

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

<sup>9</sup> Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No. 3, (Serang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011). hlm. 526 kol. 1

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

hidup dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu harus diatur oleh Pemerintah dengan baik berdasarkan hukum.<sup>12</sup>

Ukuran keadilan menurut Aristoteles yang dikutip oleh Munir Fuady adalah:

- a) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).<sup>13</sup>

### 1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku

Perjanjian baku menurut Salim HS<sup>14</sup> dalam prakteknya dikenal ada berbagai sebutan untuk jenis perjanjian/kontrak semacam ini misalnya di Perancis digunakan *Contract d'adhesion*. Perjanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda *standard contract* atau *standard voorwaarden*. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah *Allgemeine Geschäfts Bedingun* atau *standart vertrag*. Hukum Inggris menyebutkan *Standard contract*, sedangkan Mariam Darus Badruzaman<sup>15</sup> menterjemahkannya dengan istilah perjanjian baku.

Salim HS. Menegaskan tentang latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Op.cit. hlm. 93*

<sup>14</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 146.

<sup>15</sup>*Ibid.*

syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan dan apabila debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.<sup>16</sup>

Menurut Nasution AZ<sup>17</sup> sebuah perjanjian baku (standar) itu sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya sangat spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka setujulah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (*Take It*).
- 2) Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*Leave It*).

Sluijter yang diterangkan oleh Zulham<sup>18</sup> mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere*

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 149

<sup>17</sup> Nasution Az, *Konsumen Dan Hukum*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 97.

<sup>18</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 76.

*wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam klausula itu adalah undang-undang bukan perjanjian.

## **1.7. METODE PENELITIAN**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian yuridis normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap teori-teori hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap hukum positif karena mengumpulkan atau membandingkan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.

### **1.7.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual



(*Conceptual Approach*). Suatu penelitian yuridis normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan sebagai dasar melakukan analisis.

Sedangkan pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut, peneliti akan menemukan jawaban yang sesuai dan menjadi ide baru pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### **1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu:

#### **a. Data Primer**

Sumber atau bahan data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan dari OJK maupun undang-undang maupun peraturan-peraturan yang relevan dijadikan referensi.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan.

1. Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan termasuk asas hukum. Dalam penulisan hukum ini meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- h. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- i. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat
  - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
  - m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku
2. Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan. Bahan hukum sekunder dalam penulisan tesis ini bisa berupa jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan, hasil-hasil penelitian sebelumnya.
  3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang berasal dari kamus dan ensiklopedia.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Baik itu bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat

ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan perjanjian kredit UKM Mikro.

### 1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan tesis ini hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan Metode Interpretasi (a) Sistematis; (b) Gramatikal; (c) teleologis.<sup>19</sup> Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain, jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang samaapalagi suatu asas dalam peraturan lainnya juga harus jadi acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya, akan tetapi dalam hubungan tatanan Hukum terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya Interpretasi Gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara akademik bertitik tolak pada makna menuut pemakaian bahasa sehari-hari atau makan. Teknis-yuridis yang lazim atau sudah dianggap baku.<sup>20</sup> Interpretasi Gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam implikasi yuridis terhadap notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang

---

<sup>19</sup> Interpretasi dibedakan menjadi Interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*Leterlijk*), Interpretasi Gramatikal, Interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk Undang-undang, Interpretasi Sistematis, Interpretasi Historis, Interpretasi Sosiologis, Interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, Interpretasi teleologis, Interpretasi holistik dan Interpretasi holistic tematis-sistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie.1997. *Teori & Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind.Hill co. hlm. 17-18

<sup>20</sup> Ph Visser'Hoft.2001.*Penemuan Hukum (Judul asli :Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan .hlm.25

Menjalani masa penahanan. Sedangkan Interpretasi Teologis yang merupakan metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkannya, tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang actual. Menurut Hoft yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta<sup>21</sup>, penafsiran Teleologis memiliki fokus perhatian bahwa "akta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi.

## **1.8 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penulisan tesis ini, maka penulis menyusun tesis ini secara sistematis dan diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah mengenai alasan pemilihan judul penelitian, perumusan mengenai masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian dan jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk dibaca.

---

<sup>21</sup> B.Arief Sidahrta (Penerjemah). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm.56-57

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian.”

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang di dalamnya menguraikan jawaban dari permasalahan yang tersebut diatas yakni akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro dan upaya yang dapat dilakukan oleh UKM apabila terjadi sengketa terkait penerapan klausul .eksonerasi pada perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro.”

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentangkesimpulan.dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak terkait dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro dan upaya yang dapat dilakukan oleh UKM apabila terjadi sengketa terkait penerapan klausul. eksonerasi pada perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Umum Tentang Hukum Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Perjanjian

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian menurut Agus Yudah Hernoko<sup>1</sup> terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.

Subekti yang dikutip oleh Agus Yudah Hernoko<sup>2</sup> mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah perjanjian atau persetujuan dengan kontrak. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Ponthier<sup>3</sup> tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *convention (pacte)*. Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*) atau merubah (*wijzegen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terjadinya perikatan.

---

<sup>1</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Azas Prorsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 11

<sup>2</sup>Agus Yudha Hernoko, *Loc.cit*

<sup>3</sup>*Ibid. hlm. 12*

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal. 1313 KUHPerddata.yaitu :Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut tidak jelas karenasetiap perbuatan dapatdisebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanyadisebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.<sup>4</sup>

Pengertian Perjanjian menurut C. Asser-AS. Hartkamp yang dikutip oleh Herlien Budiono<sup>5</sup>adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan Pengertian Perjanjian menurut Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>6</sup>adalah sebuah peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

### **2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian**

---

<sup>4</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 15 (Selanjutnya disebut Salim I)

<sup>5</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan(Cet. IV)*. (Bandung: CitraAditya Bakti: 2014). Hlm. 3

<sup>6</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis (CEt. Ke 7)*, (Jakarta: Salemba Empat: 2017), hlm. 77



Menurut Herlien Budiono<sup>7</sup> untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut terdiri atas:

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

### **2.1.3 Subyek Perjanjian**

Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dimaksud dengan subyek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUHPdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
- c. Pihak ketiga.<sup>8</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Asas ini merupakan asas pribadi (pasal 1315 jo. 1340

---

<sup>7</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.* Hlm.5

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis : Edisi Pertama (Cet. Ke-4)*, (Bandung: Alumni: 2005). Hlm. 22

KUHPerdota). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga (*beding tenbehoevevan derden*) pasal 1317 KUHPerdota.<sup>9</sup>

“Apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, maka orang itu dianggap perjanjian bagi ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.” (Pasal 1318 KUHPerdota).”

Kedua belah pihak berkedudukan sebagai subyek perikatan melakukan perjanjian. Oleh karena itu, keduanya saling mengingatkan diri (Bahasa Belanda *zich verbinden*) yang ditujukan pada sudut kewajiban, sedangkan perkataan meminta ditetapkan suatu janji (bahasa Belanda *bedingen*) ditujukan pada sudut hak yang diperoleh dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak debitur bersifat pasif, sedangkan hak yang diperoleh kreditur bersifat aktif yang juga disebut sebagai sudut penuntutan sebagai sudut aktif.<sup>10</sup>

Beralihnya hak kepada ahli waris adalah akibat peralihan dengan alas hak umum (*onder algemene titel*) yang terjadi pada ahli warisnya. Beralihnya perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh hak berdasarkan atas alas hak khusus (*onder bijzondere titel*) misalnya orang yang menggantikan pembeli mendapat haknya sebagai pemilik. Hak yang terikat kepada sesuatu kualitas itu dinamakan hak kualitatif.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia: 2011). Hlm.38

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Loc.cit*

#### **2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUHPdata (BW) mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Syarat poin 1 dan poin 2 menurut Herlien Budiono<sup>12</sup> disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat pada poin 3 dan 4 disebut sebagai syarat obyektif.

Keempat syarat itu akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Subekti yang dinukil oleh Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>13</sup> menguraikan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Sepakat tersebut menurut Herlien Budiono<sup>14</sup> mencakup, pengertian tidak saja sepakat untuk mengikatkan diri, tetapi jugasepakat untuk mendapatkan

---

<sup>12</sup>Herlien Budiono. Op.Cit. Hlm. 73

<sup>13</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Op,Cit., hlm. 24

<sup>14</sup>Herlien Budiono. Loc.Cit

prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada prinsipnya, menurut Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>15</sup> setiap orang yang dianggap cakap atau mampu untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip ini bersumber dari Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang adalah, cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.”

Golongan orang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur (*minderjarig*);
2. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*).<sup>16</sup>

Ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata terkait dengan Orang yang belum dewasa menegaskan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Sementara itu ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan bahwa penghadap harus paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah.

---

<sup>15</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Op.Cit., hlm. 25

<sup>16</sup>*Ibid.*

Di bawah pengampuan menurut Herlien Budiono<sup>17</sup> adalah mereka yang dianggap tidak cakap untuk melaksanakan sendiri hak-hak yang mereka miliki. Ketidackakapan untuk melaksanakan dalam pandangan ini berfungsi memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap masih di bawah umur dan ditempatkan di bawah pengampuan. Penempatan di bawah pengampuan terjadi berkenaan dengan keadaan dari orang tersebut. Akibat hukumnya ialah sepanjang menyangkut kemamuan orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum, ia akan disetarakan dengan anak di bawah umur.

### 3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu menurut Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>18</sup> dalam Pasal 1320 KUHPerdadadalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur atau sebaliknya. Sejalan dengan itu ialah pendapat Asser-Rutten yang dikutip oleh Herlien Budiono<sup>19</sup>. Ia menyatakan bahwa “suatu hal tertentu” sebagai obyek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

### 4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kuasa yang halal. Ketentuan pasal 1335 KUHPerdad menyatakan bahwa:

---

<sup>17</sup>Herlien Budiono. Op.Cit. hlm. 104

<sup>18</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas . Op.Cit. hlm. 25

<sup>19</sup>Herlien Budiono. Op.Cit. hlm. 107

“Suatu perjanjian tanpa sebab atau .yang telah dibuat .karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum). Dengan kata lain, batal demi hukum.”<sup>20</sup>

Kausa yang palsu menurut Herlien Budiono<sup>21</sup> dapat terjadi jika suatu kausa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Kemungkinan juga telah terjadi kekeliruan terhadap kausanya. Dengan demikian, yang penting adalah bukan apa yang dinyatakan sebagai kausa, melainkan apa yang menjadi kausa yang sebenarnya.

Menurut Herlien Budiono<sup>22</sup> suatu perjanjian dilakukan dengan kausa yang dilarang jika kausanya bertentangan, baik dengan norma-norma dari hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berkenaan dengan ini, ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan:

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan baik atau ketertiban umum.”

#### **2.1.5 Asas-asas Perjanjian**

Sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian menurut Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>23</sup> bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum merupakan dasar atau pokok karena bersifat fundamental. Lebih lanjut, asas-asas yang dikenal di dalam hukum

---

<sup>20</sup>*Ibid.hlm. 112*

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas . Op.Cit. hlm. 22

perjanjian klasik adalah asas kebebasan berkontrak (*contracts vrijheid*), asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kepribadian.

Asas kebebasan berkontrak memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apasaja bahkan diperbolehkan untuk membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara.<sup>24</sup>

Herlien Budiono<sup>25</sup> berpendapat Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Asas konsensualisme menurut Herlien Budiono<sup>26</sup> disebabkan karena perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Herlien Budiono. Op.Cit. hlm. 31

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 29

Terdapat pengecualian dalam asas konsensualisme menurut Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>27</sup>, yakni bahwa dalam perjanjian tertentu, oleh undang-undang ditetapkan adanya formalitas-formalitas tertentu. Pengecualian tersebut seperti perjanjian penghibahan benda tidak bergerak (tanah) yang harus dilakukan dengan akta notaris. Jadi, perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian semacam ini tidak dilakukan dengan akta notaris maka perjanjian tersebut batal.

Asas *pacta sunt servanda* menurut Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>28</sup> dipatuhi sebagai sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan kontraktual.<sup>29</sup>

Adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas . Op.Cit. hlm. 23

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> Herlien Budiono. *Loc.Cit*

<sup>30</sup> *Ibid.*



Asas kepribadian menurut Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>31</sup> disimpulkan dari Pasal 1315. KUHPdata yang berbunyi :

“Pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.”

Dalam asas kepribadian, berlaku dua pengecualian sebagai berikut:

1. Janji untuk pihak ketiga

Pada janji ini, seorang membuat suatu perjanjian yang isinya menjanjikan hak-hak bagi orang lain.

2. Perjanjian garansi<sup>32</sup>

#### **2.1.6 Perjanjian Kredit**

Pengertian Kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan. Atas Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1992 Tentang. Perbankan<sup>33</sup> adalah sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;”

---

<sup>31</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Loc. Cit*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut Uswatun Hasanah<sup>34</sup> adalah:

1. Kepercayaan, yaitu adanya suatu keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan perjanjian pada waktu tertentu;
2. Waktu, adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut terlebih dahulu disetujui bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
3. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam berupa uang dan bunga atau imbalan;
4. Risiko, adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

Dalam hal perjanjian kredit, obyek atau isi perjanjian ini adalah perihal pinjam-meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan hutang.<sup>35</sup>

Ditinjau dari sifatnya, perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini

---

<sup>34</sup>Uswatun Hasanah. *Hukum Perbankan*. (Malang: Setara Press: 2017), hlm.67

<sup>35</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Op.Cit.* hlm. 77

merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap (*assecoir*). Dengan kata lain, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.<sup>36</sup>

Ditinjau dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Gatot Supramono yang dikutip Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>37</sup> menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditur kemudian diberikan kepada debitur. Dalam perjanjian baku ini, hanya dalam posisi menerima atau menolak hampir tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi.

Sementara itu perjanjian kredit menurut Wardoyo yang dinukil oleh Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>38</sup> mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

- (1) sebagai perjanjian kredit
- (2) sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
- (3) sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.
- (4) sebagai alat perlindungan hukum.

## **2.2 Kajian Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen**

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm.78

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm.78

### **2.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Menurut Janus Sidabalok<sup>39</sup> dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen-pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Secara umum menurut Ahmadi Miru<sup>40</sup> konsumen haruslah dapat mengetahui tentang seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.

---

<sup>39</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: CitraAditya Bakti: 2014), hlm. 37

<sup>40</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), hlm. 9.

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen menurut Janus Sidabalok<sup>41</sup> adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

## **2.2.2 Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Perlindungan Konsumen**

### **2.2.2.1 Produsen atau Pelaku usaha**

Produsen atau pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang Produsen atau pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum” maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun” bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>42</sup>

Jadi bisa disimpulkan pelaku usaha bisa orang perorangan maupun berbentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam pengertian diatas termasuk perusahaan baik

---

<sup>41</sup>Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 39

<sup>42</sup>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

BUMN, Usaha Dagang (UD), CV, Firma, koperasi, perusahaan swasta, usaha grosir dan eceran, distributor dan lain sebagainya.

Menurut Janus Sidabalok<sup>43</sup> sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negative berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti produsen.

#### **2.2.2.2 Konsumen**

Menurut AZ. Nasution yang dikutip oleh Janus Sidabalok<sup>44</sup> Konsumen yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

“Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. Konsumen disebutkan bahwa:”

“Konsumen adalah setiap orang "pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain" dan tidak untuk diperdagangkan.”

Di dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada dua konsumen yang dikenal oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm. 14

<sup>44</sup>*Ibid.*

Perlindungan Konsumen yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

### **2.2.2.3 Produk dan standarisasi produk**

Menurut Janus Sidabalok<sup>45</sup> dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri dari barang dan jasa.

Pengertian barang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

“Barang adalah setiap "benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai", dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

Pengertian barang di dalam undang-undang ini menurut Janus Sidabalok<sup>46</sup> sebenarnya menyalahi pembedaan-pembedaan benda menurut paham hukum perdata (hukum benda) sebab istilah

---

<sup>45</sup>*Ibid.* hlm. 15

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 15

barang hanya ditujukan pada benda berwujud, sedangkan untuk benda tidak berwujud lazim disebut dengan hak. Benda (genus), sedangkan barang (spesialis), dengan demikian barang merupakan bagian dari benda, bukan sebaliknya.

Sedangkan jasa menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Jasa adalah setiap "layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan" oleh konsumen.”

Sementara itu standarisasi menurut Gandi yang dikutip oleh Janus Sidabalok<sup>47</sup> berfungsi menjembatani kepentingan konsumen dan produsen/pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanya standarisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen.

#### **2.2.2.4 Peranan Pemerintah**

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur; mengawasi; serta mengendalikan produksi, distribusi, dan

---

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 15



peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.<sup>48</sup>

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah menurut Ading Suryana yang dikutip oleh Janus Sidabalok<sup>49</sup> adalah:

- a. Registrasi dan penilaian.
- b. Pengawasan produksi.
- c. Pengawasan distribusi.
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha.
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

#### **2.2.2.5 Klausula Baku**

Yang dimaksud dengan klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.* hlm. 19

<sup>49</sup>*Ibid.* hlm. 20

<sup>50</sup>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Pembuat undang-undang ini menurut Janus Sidabalok<sup>51</sup> menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari, hal ini juga dipertegas oleh Syahdeini yang dikutip oleh Janus Sidabalok<sup>52</sup> bahwa perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan. Konsumen menegaskan tentang sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam (standar) kontrak, yaitu sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

---

<sup>51</sup>Janus Sidablok *Op.Cit.*hlm. 21

<sup>52</sup>*Ibid.*

- melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.”

Pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas adanya larangan untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkannya sulit dimengerti.

Sedangkan pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penegasan bahwa perjanjian

tersebut batal demi hukum pada pencatuman klausula baku oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian.

Pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut adanya kewajiban pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

### **2.2.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Asas-asas perlindungan konsumen diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

1. Asas manfaat,
2. Asas keadilan,
3. Asas keseimbangan,
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen,
5. Asas kepastian hukum.

Asas-asas tersebut menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani<sup>53</sup> tentu saja bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tapi mempunyai maksud dibaliknyanya yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan mafaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara kebutuhan.

---

<sup>53</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Cet. ke-3)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.), hlm. 99.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

## **2.3 Kajian Umum Tentang Hukum Perbankan**

### **2.3.1 Pengertian Bank dan Hukum Perbankan**

Bank menurut Hermansyah<sup>54</sup> adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan

---

<sup>54</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7

usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Menurut Sentosa Sembiring yang dikutip oleh Uswatun Hasanah<sup>55</sup> pengertian dari bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan.

Secara sederhana Kasmir mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>56</sup>

Sedangkan pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan<sup>57</sup> (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Perbankan sendiri menurut Pasal 1 Angka 1 UU Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sementara itu menurut Uswatun Hasanah Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan

---

<sup>55</sup>Uswatun Hasanah. *Hukum Perbankan*. (Malang: Setara Press, 2017). hlm. 21

<sup>56</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 11.

<sup>57</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.<sup>58</sup>

Sedangkan Hukum Perbankan menurut Uswatun Hasanah<sup>59</sup> adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

### **2.3.2 Asas-Asas Hukum Perbankan**

#### **2.3.2.1 Asas Demokrasi Ekonomi**

Pasal 2 UU Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usahanya perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>60</sup>

#### **2.3.2.2 Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)**

Asas kepercayaan menurut Uswatun Hasanah<sup>61</sup> asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu

---

<sup>58</sup>Uswatun Hasanah. Op.Cit. hlm. 20

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

<sup>61</sup>Uswatun Hasanah. Op.Cit. hlm. 22

terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.

#### **2.3.2.3 Asas Kerahasiaan**

Asas kerahasiaan menurut Uswatun Hasanah<sup>62</sup> adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyaliran adalah hubungan kerahasiaan.

#### **2.3.2.4 Asas Kehati-hatian**

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>63</sup>

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat,

---

<sup>62</sup>*ibid.* hlm. 23

<sup>63</sup>*Ibid.* hlm. 24



tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.

### **2.3.3 Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah**

Menurut Sutan Remy Syahdeini yang dikutip oleh Uswatun Hasanah<sup>64</sup>, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Hubungan antara bank dan nasabah debitur juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan hanya sekedar hubungan kontraktual belaka melainkan juga hubungan kepercayaan. Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah menurut Uswatun Hasanah<sup>65</sup> dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk; *pertama*, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan; *kedua*, hubungan antara bank dengan nasabah debitur.

#### **1. Kedudukan Hukum Nasabah Penyimpan dalam Perjanjian Simpanan**

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.* hlm. 92

Menurut Sutan Remy Syahdeini, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan. Bila dana disimpan dalam bentuk giro maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening Koran. Apabila dalam bentuk deposito atau tabungan, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito atau rekening tabungan.<sup>66</sup>

Menurut Tan Kamello, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan adalah hubungan hukum sebagai “perjanjian tidak bernama”, dengan ciri sebagai berikut: *pertama*, perjanjian simpanan bersifat riil artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan; *kedua*, uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank; *ketiga*, hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitur dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditur; *keempat*, bank bukanlah sebagai penerima uang dari nasabah penyimpan; *kelima*, nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank; *keenam*, bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.* hlm. 93

<sup>67</sup>*Ibid.*

Menurut Sutan Remy Syahdeini, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyaliran dana merupakan hubungan pinjam meminjam khususnya perjanjian peminjaman uang dengan bunga.<sup>68</sup>

## 2. Kedudukan Hukum Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit

Menurut Sutan Remy Syahdeini yang dikutip oleh Uswatun Hasanah<sup>69</sup> hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang di dalam praktik pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.

Adapun hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur merupakan hubungan hukum perjanjian kredit. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>70</sup>

### 2.4. Kajian Pustaka Tentang *Good Corporate Governance*

Hukum dan kualitas pelaksanaannya oleh lembaga regulator dan pengadilan merupakan bagian yang sangat esensial bagi terwujudnya Good Corporate Governance. Dari pandangan kelembagaan, corporate governance terkait langsung dengan pembuatan kebijakan publik karena hukum, regulasi dan institusi-institusi yang ada merupakan sumber yang paling penting bagi pembentukan kerangka normatif tata kelola perusahaan di suatu negara. Peraturan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid. hlm. 96*

<sup>70</sup>*Ibid.*

perundang-undangan dalam badan hukum di bidang Pasar modal, Perseroan Terbatas, Perbankan, Asuransi kepailitan akan mempengaruhi kebijakan dan perilaku setiap perusahaan. Permasalahan tentang prinsip *Good Corporate Governance* merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya.

Kajian atas *Corporate Governance* mulai di singgung pertama kalinya oleh *Berle* dan *Means* pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham dan control. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar.

#### **2.4.1. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip tentang *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tentang pengelolaan perusahaan yang baik ( *Good Corporate Governance* ), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang perseroan terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan tentang prinsip-prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab dari pada komisaris, direksi dan para pemegang saham. Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan GCG di Indonesia. Dasar kerangka tentang GCG tersebut menjadi acuan dalam perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yang di maksud sebagai perseroan terbatas dalam Undang-Undang tersebut adalah suatu Badan hukum yang di

dirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.<sup>71</sup>

Untuk menyesuaikan implementasi prinsip-prinsip GCG, peraturan tentang Perseroan Terbatas memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab Komisaris, Direksi dan para pemegang saham. Mengingat di dalam prinsip pengelolaan usaha yang baik pengaturan tanggung jawab dari setiap organ yang ada dalam perseroan terbatas akan mempengaruhi aturan kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi/ badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi melakukan atau dalam melaksanakan kewenangannya tidak melampaui batas yang telah ditentukan, maka dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris, dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik Perseroan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT, Undang-Undang Pasar Modal (untuk perusahaan terbuka), dan Anggaran dasar dari perseroan yang bersangkutan.

Secara ringkas prinsip-prinsip pokok *Corporate Governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG adalah, Keadilan *Fairness*, Transparansi *Transparency*, Akuntabilitas *Accountability*, dan Responsibilitas *Responsibility*. Prinsip – prinsip tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

#### **2.4.1.1. Keadilan (Fairness)**

Kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi Para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan

---

<sup>71</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

asing. Semua pemegang saham berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran atas hak-hak mereka. Prinsip Keadilan ini dapat di wujudkan antara lain melindungi kepentingan Pemegang Saham minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan perusahaan dari kepentingan pribadi .

#### **2.4.1.2. Transparansi**

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan *Fraud* . prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerpana GCG dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu *Corporate* modern. Keterbukaan bukan saja kewajiban perusahaan Publik yang bersifat umum tetapi juga merupakan hak investor dalam melakukan suatu bisnis dalam bentuk suatu badan usaha berbadan hukum.

#### **2.4.1.3. Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas menyatakan bahwa pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategi suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan pertanggung jawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Oleh karena itu *Check and Balance* harus di perhatikan. Direksi harus menjalin hubungan dan memupuk kepercayaan antara Pemegang saham, perusahaan, dan *Stakeholders*.

#### **2.4.1.4. Responsibilitas**

Perusahaan dalam memenuhi pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan stakeholders harus sesuai hukum dan Perundang-undanganyang

berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, antara lain harus mengikuti peraturan Perpajakan, Peraturan Ketenaga Kerjaan dan Keselamatan Hidup, Peraturan Kesehatan, Peraturan Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen, dan Larangan Praktek Monopoli.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, **Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum**, Total Media .Yogjakarta. Cet Pertama, 2007

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausul Eksonerasi Pada Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro**

UKM pada saat ini menjadi primadona dalam penggerak sektor perekonomian di Indonesia. Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir.<sup>1</sup> UKM pun pada periode yang sama menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dianggap mampu menyerap jumlah tenaga kerja di Indonesia yaitu meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen.<sup>2</sup>

Geliat perkembangan UMKM yang sudah diramalkan dari Tahun 2008 ini jugalah yang mengilhami Pemerintah pusat untuk membuat aturan-aturan pendukung yang salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Munculnya undang-undang ini salah satu pertimbangannya adalah agar UMKM memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Apabila dilihat dari pertimbangan tersebut ini merupakan bentuk upaya proteksi terhadap UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah. Undang-

---

<sup>1</sup>Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, Kontribusi UMKM Naik, (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>), (diakses tanggal 20 Mei 2018, Pukul : 18:00 WIB)

<sup>2</sup>*Ibid.*



undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut menjadi payung hukum yang mampu memperluas gerak UMKM di Indonesia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 ini rupanya juga mengatur tentang persoalan permodalan yang merupakan salah satu persoalan klasik yang selalu menghantui UMKM. Pengaturan masalah permodalan terdapat di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”<sup>3</sup>

Jadi melihat bunyi pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dimungkinkan UKM mendapatkan suntikan modal baik dari pemerintah, swasta maupun semua lembaga pembiayaan baik perbankan maupun bukan dari pihak perbankan, sehingga diharapkan dengan kucuran dana tersebut dapat menjadi bahan rujukan untuk pengembangan UKM sebagai motor penggerak perekonomian di Indonesia.

Dan tentu saja dalam pembiayaan tersebut UKM akan terikat dengan sebuah perjanjian kredit. Harus pula dilihat bentuk perjanjian kredit tersebut dibedakan antara dana yang didapat dari Pemerintah Pusat maupun daerah dengan lembaga keuangan. Kemungkinan akan berbeda bentuk perjanjian yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93

antara Pemerintah dengan UKM dan perjanjian kredit *in casu* antara pihak perbankan atau lembaga keuangan bukan bank dengan UKM.

Menurut Hans Cool, UKM memiliki kelebihan sehingga pihak-pihak terkait termasuk pemerintah harus memberikan bantuan permodalan bagi UKM, kelebihan UKM tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sektor UKM memiliki ketahanan yang lebih terhadap krisis ekonomi jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar berskala internasional, itu semua disebabkan karena sektor UKM tidak bergantung sepenuhnya kepada ekspor maupun impor ke luar negeri sehingga ketika krisis ekonomi melanda Negara yang menyebabkan terjadinya inflasi yang mengakibatkan turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang mendapat dampak banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional mengalami colaps, bahkan ada yang harus gulung tikar karena tidak tahan dengan situasi ekonomi yang begitu buruknya, sebagai salah satu contohnya adalah ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang didukung penuh oleh pemerintah pada saat itu mengalami kebangkrutan, namun hal itu tidak berlaku pada sektor UKM yang dapat tetap eksis di dalam negeri sendiri.
- b. Sektor UMKM dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005 adalah sebesar 54,2 persen dengan laju pertumbuhan nilai tambah sebesar 6,3 persen. Angka pertumbuhan tersebut melampaui laju pertumbuhan nilai tambah untuk usaha besar.

- c. Kegiatan sektor UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia karena sektor UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja yang ada di dalam negeri, sebagai contohnya data pada tahun 2005 (angka sangat sementara), kegiatan UMKM menyerap hampir 96,8 persen dari seluruh pekerja yang berjumlah 80,3 juta pekerja.<sup>4</sup>

Menurut laporan Bank Indonesia Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Hans Cool, 2010, (*Soft skill ekonomi koperasi*) *Bantuan Pemerintah Terhadap UMKM dengan Memberikan KUR (Kredit Usaha Rakyat)*, <http://hanssuciawan.blogspot.com/2010/11/bantuan-pemerintah-terhadap-umkm-dengan.html>, diakses tanggal 29 Mei 2018, pukul 21: 00)

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah*, (<https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim/Contents/Default.aspx>, diakses tanggal 29 Mei 2018, pukul 21:05)

Pada dewasa ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan Perbankan. KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.<sup>6</sup> Untuk SKM kredit UMKM menurut Bank Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**

**Skim Kredit Usaha Rakyat**

<b>Definisi</b>	KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya. <sup>7</sup>
-----------------	---

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<b>Usaha yang Dibiayai</b>	Usaha produktif <sup>8</sup>
<b>Jangka Waktu Proyek</b>	2014
<b>Sumber Dana</b>	Bank Pelaksana 100%
<b>Plafon Kredit<sup>9</sup></b>	KUR Mikro plafon maksimal Rp5.000.000,00 KUR Retail plafon maksimal Rp 500.000.000,00
<b>Suku Bunga Kredit</b>	KUR Mikro : 22% p.a. KUR Retail : 14% p.a.
<b>Suku Bunga Petani/Peternak</b>	-
<b>Jangka Waktu Kredit</b>	KMK maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 6 tahun KI maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun
<b>Peran Pemerintah</b>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : menunjuk Bank Pelaksana

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

	<p>Kementerian Keuangan : menyediakan dana APBN dan membayar subsidi untuk IJP</p> <p>Kementerian teknis : Mempersiapkan UMKM dan Koperasi untuk dapat dibiayai dengan KUR, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain (misal : pershi inti)</p>
<b>Target Realisasi</b>	Rp 20 triliun per tahun
<b>Daerah Realisasi</b>	Seluruh provinsi
<b>Bank Pelaksana</b>	BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, 13 BPD (Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua)
<b>Permasalahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang</li> <li>2. Suku bunga KUR masih dirasakan cukup tinggi</li> <li>3. Keterlambatan pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin</li> <li>4. Kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan</li> </ol>

	<p>persyaratan</p> <p>5. Terdapat dispute terhadap beberapa ketentuan KUR.</p>
--	--

Sumber: Bank Indonesia<sup>10</sup>

Dilihat dari tabel 4.1 diatas ada 19 Bank pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pihak Kreditur dalam Kredit Usaha Rakyat yang diperuntukkan untuk UKM. Dan ini tentu saja menjadi angin segar bagi UKM untuk dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah telah membentuk Komite Pembiayaan Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ditentukan tugas-tugas dari Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

- c. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dilihat dari tugas-tugas yang dibebankan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM menandakan keseriusan pemerintah dalam rangka melakukan bentuk perlindungan bagi keberlangsungan UMKM. Dan di dalam melaksanakan tugas dari Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM tersebut Komite Kebijakan harus bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Bahkan di dalam Pasal 5 ayat (2) dimungkinkan Komite Kebijakan juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Tugas Komite tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang berada langsung di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga bertindak selaku Ketua Komite Kebijakan yang termaktub di dalam Pasal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Sebagai aturan pelaksana dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Di dalam Pasal 1



angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 telah nyata yang dimaksud Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Untuk selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 sebagai penyalur dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai penyalur Kredit UMKM atau KUR tersebut. Adapun di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tersebut telah dirumuskan persyaratan bank dan atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat ditetapkan sebagai penyalur KUR oleh Pemerintah sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR;  
dan
- c. memilikionline system data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program.

Jadi melihat persyaratan tersebut, setiap bank atau lembaga keuangan bukan bank dapat mengajukan keikutsertaan sebagai Pelaksana dari KUR, namun yang paling penting diharuskan ada verifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait kesehatan dan kinerja lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan yang akan mengambil bagian sebagai pelaksana KUR.

Sedangkan untuk UMKM calon penerima KUR selain harus ada usaha produktif dan layak yang sudah berjalan minimal 6 (enam) bulan, di dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tersebut diwajibkan juga untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan, dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar dan juga memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Akan tetapi kesemua prasyarat tersebut diatas tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dari lembaga keuangan yang akan menjadi penyalur KUR, sehingga lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, hal itu jelas diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Di samping itu jika dikaji

dari Pasal 16 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat juga terkandung Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), bank atau lembaga keuangan bukan bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang sudah dikucurkan terkait dengan KUR yang dananya adalah dana dari lembaga penyalur KUR dan sebagai pelaksana agar tepat sasaran dan memiliki kondisi yang cukup bagus sebagai lembaga pelaksana KUR bagi UKM.

Pada pembiayaan KUR untuk UKM ada dua mekanisme pembiayaan melalui pola *executing* dan *channeling*. Pola *channeling* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lembaga *linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan pinjaman KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga *linkage* meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.<sup>11</sup>
- b. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR<sup>12</sup>;

---

<sup>11</sup> Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

<sup>12</sup> *Ibid.*

- c. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.<sup>13</sup>
- d. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh *Lembaga Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.<sup>14</sup>
- e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-upload oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- f. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- g. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
- h. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit penerima KUR kepada perusahaan penjamin.

Untuk skema channeling lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 4.1 di bawah ini

#### **Gambar 4.1**

#### **Skema Channeling<sup>15</sup>**

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

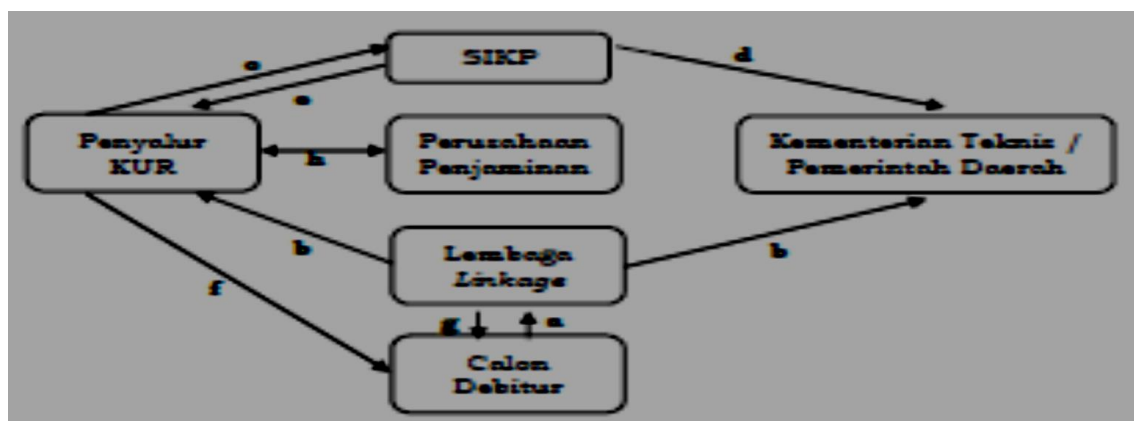


Pada KUR Mikro yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:

- Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
- Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
- Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro.
- Penerima KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro.
- Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Mikro.

Sedangkan untuk skema *executing* bisa dilihat dalam Gambar 4.2 di bawah ini.

**Gambar 4.2 Skema *Executing***<sup>16</sup>



<sup>16</sup>*Ibid.*

Sumber: **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.**

Dari gambar 4.2 tersebut di atas dapat dijelaskan terkait dengan Skema Executing sebagai berikut:

- a. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
  - 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
  - 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin;
  - 3) menjaminkan agunan kepada penyalur KUR.
- b. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR meng-*upload* data calon penerima KUR yang diberikan oleh *Lembaga Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sector dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.

- e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- f. Penyalur KUR menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Lembaga *Linkage* yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
- g. Lembaga *linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR berdasarkan daftar calon penerima KUR potensialnya.
- h. Penyalur KUR mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga *linkage*. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas penerima KUR yang telah diberikan penyaluran Kredit/Pembiayaan.

Sedangkan untuk pengaturan penyaluran KUR UKM melalui lembaga *Linkage* dengan pola *Executing* diatur sebagai berikut:

- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
- b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
- c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskanpinjamkan kepada calon yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap.
- d. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.



- e. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimum Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
- f. Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Penyalur KUR.

Dalam perjanjian kredit apapun yang selama ini menjadi kendala adalah besaran bunga dan denda, hal inilah yang seringkali menjadi klausula baku dalam perjanjian kredit, dan ketidakpastian akan besaran bunga menjadi sesuatu yang memberatkan bagi debitur. Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dikatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan subsidi bunga penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.”

Dari bunyi Pasal 11 ayat (1) tersebut jelas terlihat bagaimana peran pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pelaku UKM yang berniat mendapatkan KUR dengan stimulan pemberian subsidi bunga bagi para pelaku bisnis UKM. Dan bunga yang harus dikenakan kepada para pelaku bisnis UKM yang mendapatkan KUR maksimal sebesar 9% (Sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga *flat*/anuitas yang setara. Hal ini jelas diatur di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Suku bunga KUR Mikro sebesar 9% (Sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga *flat*/anuitas yang setara.”

Lantas apakah akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausul eksonerasi pada Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro perlu dianalisis lebih lanjut. Seperti yang disebutkan di dalam Bab sebelumnya, bahwa kecenderungan adanya perubahan tingkat suku bunga walaupun suku bunga yang ada tidak boleh melebihi dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Pemerintah maksimal sebesar 9% pertahun tetap juga akan memberatkan debitur dan juga meskipun ada subsidi bunga dari Pemerintah terhadap KUR kepada pelaku bisnis UKM Usaha Mikro. Sementara itu adanya subsidi bunga juga hanya bisa diketahui dari Perjanjian ditingkatan internal antara Penyalur KUR dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, sehingga belum tentu juga seorang debitur mampu mengetahui Perjanjian Subsidi Bunga antara Penyalur KUR dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal ini yang kemudian bisa

dimanfaatkan oleh Penyalur KUR untuk memunculkan Klausula eksonerasi di dalam perjanjian kredit UKM Usaha Mikro.

Apalagi pengetahuan para pelaku bisnis UKM Usaha Mikro di Indonesia terkait asas-asas perjanjian sangatlah minim padahal di dalam sebuah perjanjian kredit haruslah memuat asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak. Dalam konteks perjanjian kredit UKM Usaha Mikro ini pelaku bisnis menjadi pihak pelaku bisnis UKM Usaha Mikro biasanya mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan Penyalur KUR, hal ini bisa dilihat dari tingkat kebutuhan mereka untuk jenis KUR modal kerja maupun KUR investasi, mereka bisa dikatakan secara sosial-ekonomi sangat membutuhkan KUR tersebut walaupun disisi lain mereka tidak memahami perbuatan hukum yang akan diperbuatnya maupun akibat hukum dari perjanjian kredit UKM Usaha Mikro tersebut, apalagi apabila perjanjian tersebut dilakukan melalui perjanjian standar. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Mariam D. Badruzaman yang dikutip oleh Muhammad Syahreza, yang menyebutkan bahwa:

“Dalam perjanjian standard biasanya pihak lawan mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang lemah, baik karena posisi sosial-ekonominya, maupun karena ketidaktahuannya mengenai perbuatan hokum yang akan diperbuatnya serta akibat hukumnya.”<sup>17</sup>

Apabila demikian keadaannya yaitu pihak debitur dalam hal ini pelaku bisnis UKM Usaha Mikro ditempatkan diposisi yang lemah maka sebenarnya diperlukan intervensi dari pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur secara khusus

---

<sup>17</sup>Muhammad Syahreza, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Klausula Eksonerasi Yang Terdapat Pada Perjanjian Kredit Bank*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 29

larangan penerapan asas eksonerasi dalam aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, agar tercapai asas keseimbangan dalam perjanjian kredit UKM Usaha Mikro pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan oleh lembaga penyalur KUR. Pada konteks ini asas keseimbangan merupakan bentuk dari pemberdayaan dan bentuk penyeimbangan posisi tawar debitur dalam hal ini pelaku bisnis UKM Usaha Mikro yang menerima KUR. Menurut Agus Yudah Hernoko<sup>18</sup> konteks semacam ini asas keseimbangan bermakna “*equal-equilibrium*” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan sendiri ditambahkan oleh Agus Yudah Hernoko<sup>19</sup> adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas Negara (pemerintah) sangat kuat.

*Equal-equilibrium* menurut penulis sendiri di dalam menempatkan pihak pelaku bisnis UKM Usaha Mikro berkedudukan setara dengan lembaga keuangan baik bank maupun bukan. Sehingga hak dan kewajiban antara pihak pelaku bisnis UKM Usaha Mikro dengan lembaga keuangan baik bank maupun bukan haruslah diatur dengan seimbang.

Apabila asas keseimbangan pun menjadi suatu hal yang sangat rumit untuk ditaati di dalam perjanjian kredit UKM Usaha Mikro oleh pihak penyalur KUR

---

<sup>18</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Prorsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 66

<sup>19</sup>*Ibid. Hlm. 67*

kepada pihak pengusaha UKM Usaha Mikro yang mengajukan kredit KUR, maka tentu saja asas kebebasan berkontrak pun menjadi sesuatu yang bakal sulit juga untuk ditaati terutama di dalam hal bagaimana pengusaha UKM Usaha Mikro mampu menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dikarenakan adanya klausula eksonerasi yang memang sudah ditentukan (*by design*) oleh penyalur KUR terkait dengan suku bunga dan besaran denda yang memang sedikit dipaksakan, biasanya pemaksaan tersebut disertai ancaman kredit tidak akan disetujui apabila pengusaha UKM Usaha Mikro tidak mau menerima klausula eksonerasi tersebut. Padahal pemaksaan tersebut menurut penulis sudah jelas-jelas bertentangan dengan pasal 1321 KUHPerdata, yang mana bunyi pasal tersebut sebagai berikut: “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Jadi melihat bunyi pasal 1321 KUH perdata tersebut sebuah perjanjian tidak dapat dipaksakan dari isi dan substansi perjanjian tersebut dan harus didasari oleh kesepakatan para pihak. Sehingga sebuah perjanjian KUR UKM Usaha Mikro tidaklah sah apabila ada unsur paksaan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak termasuk besaran bunga dan denda haruslah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Otoritas Jasa Keuangan<sup>20</sup> (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kinerja lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank sendiri mengharuskan perjanjian kredit memperhatikan asas keseimbangan, keadilan serta kewajaran dan

---

<sup>20</sup>Selanjutnya disebut OJK. **OJK** adalah sebuah lembaga Negara yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

juga melarang bank maupun lembaga pembiayaan membuat aturan baku di dalam perjanjian kredit pembiayaan, hal itu diatur di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku tertanggal 20 Agustus 2014. Adapun larangan klausula di dalam perjanjian baku yang menjadi konsen pengawasan dari OJK adalah sebagai berikut:

- a. Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)<sup>21</sup>, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.<sup>22</sup>
- b. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.<sup>23</sup>

Dari poin a pada larangan klausula di dalam perjanjian baku di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku tersebut sudah jelas bahwa klausula eksonerasi dilarang diterapkan di dalam perjanjian kredit oleh OJK.

Adapun perjanjian baku yang dilarang oleh OJK adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Untuk selanjutnya disebut PUJK

<sup>22</sup>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku ([https://www.ojk.go.id/Files/201409/SEOJKPerjanjianBaku\\_1411632483.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201409/SEOJKPerjanjianBaku_1411632483.pdf), diakses tanggal 23 Juni 2018 Pukul 20:49)

<sup>23</sup>*Ibid.*

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;<sup>24</sup>
- b. menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli<sup>25</sup>;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;<sup>26</sup>
- d. mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- e. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh;<sup>27</sup>
- g. PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

- h. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secaraangsuran.<sup>29</sup>

Dilihat dari poin f pada bentuk perjanjian baku yang dilarang oleh OJK berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku tersebut, maka apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga maka debitur harus tunduk pada peraturan yang berlaku atau membebankan bunga tersebut ke debitur termasuk di dalam poin f yang dilarang oleh OJK.

Konsekuensi dari Asas eksonerasi sendiri di dalam Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro dapat memunculkan tanggung jawab yang tidak berimbang sehingga menimbulkan beban yang berat bagi pelaku bisnis UKM Usaha Mikro, semisal denda maupun ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku bisnis UKM Usaha Mikro. R.H.J Engels yang dikutip oleh Muhammad Syahreza<sup>30</sup> menyebut adanya tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan klausula eksonerasi yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian;
- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perjanjian keadaan darurat);

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Muhammad Syahreza, *Op.cit*, hlm. 10



- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang di derita oleh pihak ketiga.

Ketiga bentuk yuridis ini menurut penulis biasanya pelaksanaannya lebih dititikberatkan kepada debitur yaitu pelaku bisnis UKM Usaha Mikro sehingga terlihat asas keseimbangan tidak berjalan semestinya di dalam Perjanjian kredit UKM Usaha Mikro.

### **3.2 Bentuk Perlindungan Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro Terkait Klausul Eksonerasi Di Dalam Perjanjian Tersebut**

Dengan posisi lemah debitur dalam perjanjian kredit UKM Usaha Mikro, maka diperlukan suatu mekanisme perlindungan bagi debitur KUR UKM Usaha Mikro dan juga memang sudah seharusnya ada intervensi dari otoritas Negara yaitu pemerintah, agar keberlangsungan bisnis UKM bisa berkesinambungan, dikarenakan bisnis UKM menjadi soko guru perekonomian di Indonesia. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya bisnis UKM mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar di Indonesia. Makanya pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum ekstra maksimal bagi keberadaan bisnis UKM.

Perlindungan hukum itu juga merupakan langkah afirmatif apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PUJK dalam penyaluran KUR termasuk adanya asas eksonerasi dalam perjanjian kredit UKM usaha Mikro. Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu upaya dalam perlindungan hukum terhadap UKM,

seperti yang termaktub di dalam konsideran huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi:

“bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.<sup>31</sup>”

Perlindungan hukum pada kesinambungan juga diupayakan di dalam iklim usaha, yang itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi:

“Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.<sup>32</sup>”

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93).

<sup>32</sup>*ibid*

Sudah jelas dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut upaya perlindungan hukumnya adalah dengan menetapkan Undang-undang dan aturan-aturan terkait UKM.

Fakta di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan dengan debitur biasanya pihak kreditur tidak memberikan informasi yang jelas tentang besaran kenaikan suku bunga, fluktuasi nilai suku bunga menjadikan alasan mereka untuk tidak dapat memastikan bahkan ketika nilai bunga turun terkadang debitur tidak diberitahu oleh pihak bank, ada keuntungan sepihak yang mencoba dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur. Mereka dengan tidak memberikan informasi yang benar dan pasti tentang fluktuasi suku bunga, sama halnya dengan kreditur tidak melaksanakan kewajibannya.

Hak Konsumen salah satunya adalah mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai fluktuasi bunga dan adanya kepastian bunga yang diberlakukan per tahunnya terhadap kredit UKM Usaha Mikro yang diduplikasinya. Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan ketegasan tentang Hak Konsumen, terutama pada Pasal 4 huruf (c) yang memberikan ketegasan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika diinterpretasikan bunyi pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam perjanjian kredit UKM Usaha Mikro, maka debitur berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas serta

jujur terkait kondisi dan jaminan fluktuasi bunga yang diterapkan oleh perbankan atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur KUR.

Senada dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Hak konsumen tersebut menjadi kewajiban perbankan atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur KUR, yang mana kewajiban bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur KUR untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur diatur di dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, adapun bunyi pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

*“Kewajiban pelaku usaha adalah:*

.....

*b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;<sup>33</sup>”*

Dari bunyi Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut diatas kewajiban ini adalah kewajiban mutlak, sehingga bank ataupun lembaga keuangan bukan bank yang bertindak sebagai kreditur di dalam Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro harus memberikan informasi tentang besaran bunga dan *range* fluktuasi bunga yang akan dikenakan per tahunnya dari KUR untuk UKM Usaha

---

<sup>33</sup>Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Mikro. Menurut penulis ini adalah bentuk pelaksanaan dari asas keseimbangan sebagai salah satu asas yang harus ditaati di dalam membuat perjanjian kredit.

Hal ini juga diperkuat dengan larangan untuk memaksakan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.”<sup>34</sup>”

Sehingga pemaksaan terhadap debitur yaitu pelaku bisnis UKM Usaha Mikro di dalam perjanjian KUR Usaha Mikro terkait besaran bunga dan denda menjadi sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi tidak ada alasan bagi perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank untuk memaksakan kepada pelaku UKM Usaha Mikro untuk menerima besaran bunga berdasarkan fluktuasi bunga bank dan juga ketidakpastian besaran denda.

Salah satu asas yang menjadi konsen lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah Asas kepastian hukum, yang mana di dalam asas kepastian hukum ini menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani<sup>35</sup> dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Apabila dikaitkan dengan Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro, maka antara pihak perbankan atau lembaga keuangan bukan bank yang menjadi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Cet. ke-3)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.), hlm. 99.

penyalur KUR dengan pihak pelaku UKM Usaha Mikro seyogyanya menaati Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, karena Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak utamanya pihak konsumen sebagai pihak yang selalu dilemahkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit UKM Usaha Mikro itu sendiri seharusnya juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, seperti diungkapkan oleh Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas<sup>36</sup> , bahwa fungsi perjanjian kredit sebagai sebagai alat perlindungan hukum.

Dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan KUR, maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada Bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang menjadi penyalur KUR bagi UKM Usaha Mikro, hal tersebut diatur di dalam Pasal 4 ayat (9) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.”

---

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm.78

Apabila dikaitkan dengan Perlindungan Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro Terkait Klausul Eksonerasi Di Dalam Perjanjian Tersebut, sangatlah relevan jika pelaku UKM Usaha Mikro dapat meminta perlindungan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila di dalam perjanjian KUR Usaha Mikro antara Pelaku UKM Usaha Mikro dengan bank ataupun dengan lembaga keuangan bukan bank terdapat klausula eksonerasi di dalam perjanjian tersebut. Apalagi OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku yaitu larangan perjanjian baku yang di dalamnya memuat larangan klausula eksonerasi/eksepsi.

Bahkan untuk melindungi para konsumen jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hal ini membawa angin segar bagi para pelaku bisnis UKM Usaha Mikro yang melakukan perjanjian kredit KUR Usaha Mikro antara perbankan atau lembaga keuangan bukan bank yang bertindak sebagai Penyalur Kredit dengan pihak pelaku bisnis UKM Usaha Mikro. Pada Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ditegaskan bahwa Perbankan atau lembaga keuangan bukan bank wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang di dalamnya memuat manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan. Dengan kata lain apabila melihat aturan di dalam pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 bunga dan denda bunga sebagai bentuk biaya yang dibebankan kepada konsumen jasa keuangan haruslah diterangkan juga di dalam ringkasan informasi produk dan/atau layanan, sehingga bank ataupun lembaga pembiayaan

bukan bank dilarang membuat anasir yang menyesatkan dan menimbulkan ambiguitas terkait dengan bunga dan denda bunga pada perjanjian kredit termasuk perjanjian KUR.

Dilihat dari kebijakan terkait KUR untuk UKM Usaha Mikro sendiri ada pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan KUR UKM Usaha Mikro melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hal ini dapat ditemui di dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.”

Dari aturan diatas ada bentuk perlindungan bagi pelaku UKM Usaha Mikro dalam bentuk pengawasan pada pelaksanaan program KUR UKM Usaha Mikro, sehingga secara tidak langsung pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap perjanjian kredit KUR UKM Usaha Mikro agar tidak ada upaya membubuhkan klausul eksonerasi di dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank yang bertindak sebagai penyalur KUR.

Dan di dalam efektifitas pengawasan pelaksanaan KUR Pemerintah juga membentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan



Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang secara tegas berbunyi:

“Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Dan Otoritas Jasa Keuangan.”

Selain dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan KUR UKM Usaha Mikro, bentuk perlindungan terhadap pelaku bisnis UKM Usaha Mikro adalah adanya subsidi bunga bagi pelaku bisnis UKM Usaha Mikro, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat. Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 20/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat. Menurut kedua aturan tersebut besaran subsidi bunga ditentukan melalui peraturan menteri keuangan, selanjutnya untuk pemberian subsidi bunga diambilkan dari APBN. Sedangkan di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1355/KMK.05/2015 Tentang Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, besaran subsidi bunga untuk Kredit UKM Usaha Mikro sebesar 10% (sepuluh persen).

Bentuk lain dari perlindungan bagi debitur dalam perjanjian kredit UKM Usaha Mikro terkait klausul eksonerasi di dalam perjanjian adalah pemberlakuan tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi. Pengaturan suplesi dan restrukturisasi bagi UKM Usaha Mikro diatur di dalam Pasal 13 ayat (4) Jo. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat jo. Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dengan demikian dari hasil dan pembahasan di BAB sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausul eksonerasi pada perjanjian kredit UKM Usaha Mikro adalah perjanjian kredit tersebut dapat dibatalkan oleh kreditur, karena bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdata Jo. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku tertanggal 20 Agustus 2014.
2. Bentuk Perlindungan Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit UKM Usaha Mikro Terkait Klausul Eksonerasi Di Dalam Perjanjian Tersebut adalah:
  - a. Lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - b. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan KUR UKM Usaha Mikro melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tugasnya melakukan pengawasan sebagai langkah perlindungan preventif.

- c. Pengawasan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Pemberian subsidi bunga dengan besaran subsidi bunga untuk Kredit UKM Usaha Mikro sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Pemberlakuan tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi

#### **4.2 Saran**

Dalam penulisan tesis ini saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaku bisnis UKM Usaha Mikro harus mencermati isi perjanjian KUR Usaha Mikro yang ada dan apabila ditemukan klausul eksonerasi segera meminta pembatalan perjanjian tersebut kepada bank ataupun lembaga pembiayaan bukan bank yang menjadi penyalur KUR Usaha Mikro, sebaliknya bank maupun lembaga keuangan bukan bank sudah selayaknya memberikan informasi yang jelas dan jujur serta menghindari klausul eksonerasi terkait perjanjian KUR UKM Usaha Mikro.
2. Perlunya peran pemerintah di dalam pengasawan yang lebih ketat lagi dimulai dari perjanjian KUR UKM Usaha Mikro, agar klausul eksonerasi yang memberatkan pelaku bisnis UKM Usaha Mikro tidak terjadi pada perjanjian KUR Usaha Mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers: 2011
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2017. *Pokok-pokok Hukum Bisnis (Cet. Ke 7)*, Jakarta, Salemba Empat.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Cet. ke-3)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: Bina Ilmu
- Herlien Budiono, 2014 *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan (Cet. IV)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Kasmir, , 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Mariam Darus Badruzaman, 2005. *Aneka Hukum Bisnis : Edisi Pertama (Cet. Ke-4)*, (Bandung: Alumni.

Munir Fuady, 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia

Nasution Az, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Ph Visser'Hoft.2001.*Penemuan Hukum (Judul asli :Rechtvinding)*, Penerjemah B. arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan

Salim H.S., 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Uswatun Hasanah. : 2017. *Hukum Perbankan*. Malang. Setara Press

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum PerikatanDilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung, Pustaka Setia.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana.

## **Jurnal-Jurnal**

Inge Dwisvimiar, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No. 3, (Serang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011)

Muhammad Syahreza, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Klausula Eksonerasi Yang Terdapat Pada Perjanjian Kredit Bank*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2009),

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang *Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku

Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah  
Nomor 8 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku  
Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah  
Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator  
Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan  
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* Nomor 8 Tahun 2015  
tentang *Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.05/2015  
tentang *Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang *Perlindungan  
Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang *Kewajiban  
Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank  
Bagi Bank Umum*.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang *Perjanjian  
Baku*.